

TANTANGAN GURU SEJARAH: PESAN SEJARAH SEBAGAI KONSEP PENDIDIKAN NILAI

Oleh :

Anwar Senen dan Imam Barnadib

Abstrak

Keberhasilan guru sejarah menyampaikan pesan sejarah sebagai suatu nilai moral yang perlu difahami siswa, terletak pada bagaimana cara guru mengembangkan materi pelajaran di depan kelas. Penggunaan metode pengajaran secara tepat yang dikemas secara kreatif akan memungkinkan pesan sejarah dapat disampaikan kepada siswa. Penekanan pada pesan sejarah ini penting, karena selama ini masih terkesan bahwa mata pelajaran sejarah hanya dianggap sebagai pengetahuan hafalan sejumlah peristiwa masa lalu. Hal demikian menyebabkan pemahaman siswa terhadap pelajaran sejarah sebatas pada pengetahuan deskriptif konsep apa, di mana, kapan dan mengapa suatu peristiwa sejarah terjadi, menjadi dasar mempelajari sejarah. Dalam kerangka memori tidaklah keliru. Tetapi sejarah sebagai mata pelajaran di sekolah dalam konsep pendidikan masih jauh dari harapan. Sebagai konsep pendidikan, pelajaran sejarah dapat bercerita kepada siswa. Oleh sebab itu, metode pengajaran sejarah oleh guru dengan pendekatan moral akan lebih tepat digunakan. Pendekatan moral sebagai konsep belajar mengajar lebih memungkinkan menjadikan pelajaran sejarah dinamis dalam menyikapi situasi yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian bahwa belajar sejarah memiliki dimensi masa lalu, kini dan akan datang akan terjawab melalui pendekatan moral dalam konsep pembelajarannya.

Pendahuluan

Sejarah sebagai mata pelajaran di sekolah memiliki misi mendidik. Kenyataan di lapangan, para guru masih banyak menyampaikan pelajaran sejarah lebih menekankan pada aspek kognitif. Akibatnya, materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dipusatkan pada kronologi peristiwa sejarah yang

pernah terjadi. Dugaan yang menyatakan bahwa mengajarkan sejarah lebih menekankan pada aspek kognitif ini sebagaimana dikemukakan oleh Diana Musnir (1997: Juli) dalam desertasinya yang berjudul *Bias Tujuan Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah di SMU Kurikulum 1994*. Padahal sejarah sebagai bagian dari mata pelajaran di sekolah mempunyai fungsi edukatif, di samping sebagai ilmu pengetahuan dalam aspek kognitif. Mengutip pendapat Durant, dikatakan oleh Diana bahwa nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam sejarah dapat digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dan inspirasi dalam tindakannya pada masa yang akan datang.

Pandangan idealistik berkenaan dengan sejarah suatu bangsa sering didengungkan bahwa sejarah merupakan bagian terpenting dari pembentukan identitas dan karakter nasional. Melalui sejarah, orang dapat melihat dan membaca masa lalunya, baik yang cemerlang maupun yang kelam. Berdasarkan masa lalu suatu bangsa dapat menjadikannya sebagai cermin untuk menapak nilai-nilai idealistik dari sejarah seperti: *sejarah adalah guru yang terbaik (historia vitae magistra)*, *jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, melalui sejarah manusia menjadi bijaksana* dan sebagainya. Atas dasar pandangan idealistik dari sejarah tersebut, kiranya perlu upaya kreatif guru dalam menyampaikan proses pembelajaran kepada anak didiknya.

Upaya kreatif guru ini diperlukan agar penyampaian materi pelajaran sejarah tidak terjerat oleh kronologi peristiwa sejarah sebagai memori yang harus dihafal oleh siswa. Agar supaya sejarah memiliki fungsi edukatif, seperti tercermin pada ungkapan-ungkapan idealistik bahwa sejarah adalah guru yang terbaik, maka diperlukan keberanian guru menyampaikan materi dengan pendekatan moral. Pendekatan moral dalam konsep pengajaran sejarah ialah agar peristiwa sejarah dapat dipahami oleh siswa sebagai suatu peristiwa yang mengandung makna, untuk dapat dijadikan pedoman atau ketauladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, menyampaikan materi pelajaran sejarah sebagai konsep edukatif (pendidikan nilai) akan terwujud.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kreativitas guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Kreativitas yang dimaksud ialah keterampilan menggunakan metode pembelajaran secara tepat sehingga nilai moral yang terkandung dalam setiap peristiwa sejarah dapat dipahami oleh siswa. Dalam hal ini, diperlukan keberanian guru untuk *menerjemahkan* kurikulum yang akan dikembangkan dalam proses belajar mengajar, sejauh tidak menyimpang dari tujuan.

Permasalahannya, guru umumnya takut mengembangkan daya kreativitasnya dalam melaksanakan kurikulum. Padahal sikap demikian sangat keliru. Seperti dikatakan oleh Suharsimi Arikunto (1997: November), bahwa penilaian terhadap guru bukan didasarkan pada ketaatan guru terhadap peraturan, tetapi pada tingkat kreativitasnya. Guru yang baik bukan guru yang patuh seratus persen, tetapi yang mampu kreatif sepanjang tidak menyimpang dari kebijakan pokok (kurikulum). Dengan melihat permasalahan tersebut tulisan ini ingin menggugah kembali *kesadaran* guru sejarah, sebagai seorang pendidik yang sarat dengan konsep nilai selain kronologi historis sebagai fakta sejarah yang harus disampaikan kepada siswa.

Sejarah Dalam Konsep Pendidikan

Sesungguhnya, seorang guru - apapun yang diajarkan - punya kepentingan menanamkan nilai moral (pendidikan) kepada anak didiknya. Adanya pola pikir dalam mengikuti kehidupan yang berkembang di masyarakat (sekolah) menjadi tanggung jawab guru sebagai pendidik. Oleh sebab itu, guru sebagai pendidik berkewajiban untuk: 1) Melihat implikasi nilai etik (moral) dalam setiap proses perubahan yang terjadi; 2) Membantu perkembangan nilai-nilai dalam diri seseorang (siswa); 3) Membantu agar anak didik dapat mengambil sikap dan keputusan, dalam merencanakan kehidupan secara berarti. Pendapat itu dikemukakan oleh M. Sastropratedjo dalam E.M.K. Kaswardi (1993: 3) yang disebut sebagai *Value Clarification*, yang diterjemahkan sebagai pendidikan nilai. Maka menurut M. Sastropratedjo, guru bidang studi apapun punya tanggung jawab "mendidik" yang berkaitan dengan materi pelajarannya.

Berkaitan dengan sejarah sebagai pelajaran di sekolah, konsep pembelajaran sejarah perlu diubah atau ditingkatkan untuk lebih menekankan pada konsep pemahaman nilai moral. Sehingga pembelajaran yang selama ini menggunakan sistem kronologis historis deskriptif, dalam pemahamannya perlu ditekankan melalui pendekatan moral. Melalui pendekatan moral, diharapkan tujuan pendidikan untuk menciptakan kepribadian bangsa melalui nilai-nilai historis dapat terwujud.

Pendekatan moral dalam proses pembelajaran sejarah adalah salah satu alternatif yang paling mungkin diterapkan, dengan tidak mengesampingkan aspek kognitif dalam kerangka konsep edukatif. Selama ini, proses

pembelajaran sejarah di sekolah mengalami bias terlalu jauh dari aspek afektif yang mestinya menjadi tujuan utama pembelajaran. Penekanan pada aspek kognitif yang hanya mengurutkan informasi peristiwa secara kronologis menyebabkan sejarah tidak memiliki *daya hidup*.

Hemat penulis tepat apa yang diprediksi oleh Rodney F. Allen seorang pakar ilmu sosial dari Florida State University, dalam suatu seminar yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana IKIP Yogyakarta. Makalahnya yang berjudul, *Social Science Teacher Education in an Era of Globalization* (Rodney F. Allen, 1998: 8) mengatakan bahwa:

“Sebagai bagian dari globalisasi ini, krisis ekonomi dan politik di Indonesia memunculkan pertanyaan tentang peranan sejarah (nasional, budaya dan umum) dalam pendidikan. Semua laporan dan pembicaraan tentang krisis ekonomi dan politik dikemas dengan istilah-istilah sejarah. Analogi dibuat dengan mencari padanannya dalam sejarah. Kultur Jawa dipakai untuk menjelaskan perilaku politik. Cerdik pandai dan komentator politik merasa yakin bahwa sejarah diperlukan untuk bisa memahami konteks dan makna peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Sejarah menjadi penting, hidup dan berguna, tidak hanya sebatas fakta tapi untuk membantu membuat keputusan. Namun bukan begini cara pandang anak-anak sekolah terhadap sejarah di dalam kurikulum”.

Sebenarnya, yang menyebabkan peserta didik salah memaknai sejarah di dalam kurikulum adalah guru. Hal ini disebabkan oleh karena guru terjebak memaknai nilai moral yang terkandung dalam materi ajar yang ditentukan oleh kurikulum. Materi yang dimaksudkan lebih ditekankan pada kronologi suatu peristiwa sejarah dalam menyampaikan pokok bahasan dalam pembelajaran. Apalagi materi yang terjabar pada kurikulum tersebut dilaksanakan dalam proses pembelajaran apa adanya, maka peserta didik hampir dapat dipastikan tidak akan memahami nilai moral yang terkandung dalam materi pelajaran sebagai pesan sejarah (pendidikan sejarah). Anak didik hanya memperoleh deretan fakta-fakta masa lalu yang tidak terkait dengan peristiwa aktual dan akan datang. Padahal, seperti dikemukakan oleh Rodney F. Allen di muka, bahwa sejarah diperlukan untuk bisa memahami konteks dan makna peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Tugas pemahaman ini menjadi tugas guru dalam

menerjemahkan kurikulum, sehingga sejarah menjadi penting, *hidup* dan berguna, tidak hanya sebatas fakta tetapi untuk membantu membuat keputusan.

Keberanian Guru Menerjemahkan Kurikulum

Keberanian guru sejarah menerjemahkan kurikulum, akan memungkinkan materi ajar sejarah mengandung nilai-nilai edukatif bermakna bagi peserta didik dalam kontribusinya mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang besar. Untuk itu, penampilan guru di depan kelas sebagai upaya menerjemahkan kurikulum (GBPP) berpengaruh cukup signifikan terhadap keberhasilannya menyampaikan pesan sejarah yang perlu dipahami oleh siswa. Dari penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa sejumlah sekolah (siswa) apatis terhadap mata pelajaran sejarah ternyata disebabkan oleh penampilan guru di depan kelas. Cara guru yang menyampaikan materi sejarah dalam proses pembelajarannya terjebak oleh buku pegangan, kurang mendapat respon positif dari siswanya. Kesan *cuek* terhadap guru atau pelajaran diwujudkan dalam sikap yang kurang responsif selama proses pembelajaran.

Guru yang terjebak oleh buku pegangan, dalam penampilannya di depan kelas tampak tidak mampu mengembangkan materi pelajaran. Penyampaian materi pelajaran lebih mengindikasikan pada menghafal materi yang ada pada buku pegangan. Sehingga bagi siswa yang telah memiliki buku, apa yang diuraikan guru terkesan menjemukan. Maka suasana kelas tampak gaduh karena kurang memperhatikan uraian guru saat mengajar di depan kelas. Konsep kronologis deskriptif nampaknya menjadi dasar guru dalam menyampaikan materi ajar. Terkesan guru yang demikian tidak berani menerjemahkan kurikulum dalam konsep pendidikan. Sehingga materi pelajaran yang disampaikan *persis* seperti yang tertuang dalam buku pegangan tanpa upaya pengembangan secara kontekstual. Inilah yang menyebabkan nilai historis dalam pembelajaran tidak sampai kepada anak didiknya. Bagi siswa, seolah-olah ada kesan bahwa sejarah (dalam konsep masa lalu) tidak ada kaitan dengan kehidupan sekarang dan akan datang.

Namun demikian, ada sementara guru mampu menyampaikan materi pelajaran sejarah sehingga dapat membangkitkan emosi siswanya, karena siswa menghayati dan memahami uraian guru. Guru ini dengan gayanya yang khas dapat menjelaskan nilai-nilai historis yang terkandung dalam materi

pelajaran, secara moral tetap relevan dengan dimensi kekinian dan akan datang. Keberanian guru mengembangkan materi pelajaran menjadikan konsep deskriptif dapat bernilai untuk menyikapi hidup dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin akan lebih jelas apa yang dimaksudkan penulis atas upaya guru dimaksud apabila mencermati penggalan “rekaman” catatan lapangan penulis selama penelitian dilaksanakan. Guru dengan kode “R” mengajar mata pelajaran sejarah dengan pokok bahasan Perkembangan Paham-paham Baru di Eropa dan Amerika. Sub pokok bahasan Nasionalisme (SMU Klas II Cawu I). Berikut petikannya:

“...
Nasionalisme dalam bidang ekonomi. Cinta terhadap produksi dalam negeri. Kalau orang sendiri tidak mencintai, siapa yang akan mencintai. Tetapi remaja sekarang gengsi, malu memakai produk dalam negeri. Memakai pakaian yang bermerek luar negeri. Apabila hal ini berjalan terus bagi generasi bangsa akan menyebabkan produksi dalam negeri berkurang. Menyebabkan pasar seret-perusahaan rugi-terjadi PHK-produksi macet-akhirnya kesejahteraan rakyat berkurang banyak.
...”

Uraian atau penjelasan guru “R” seperti diuraikan di atas tampak, bahwa guru mampu mengembangkan materi pelajaran secara kontekstual. Berhubung dengan itu nilai-nilai moral yang terkandung dalam materi Nasionalisme, secara aktual dapat dipahami oleh siswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesan komunikatif dan kontekstual selama proses pembelajaran tampak pada penjelasan guru “R”. Pelajaran sejarah dapat dikomunikasikan dalam dimensi kekinian melalui pendekatan moral oleh guru. Melalui pendekatan moral pula dapat dipahami bahwa pelajaran sejarah bernilai guna untuk menyikapi hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kesan bahwa sejarah hanya berisi tentang kapan suatu peristiwa atau suatu “paham baru” muncul dan berkembang, dengan penjelasan guru melalui pendekatan moral, akan dapat disampaikan menjadi pesan sejarah yang *bernilai hidup*.

Kenyataannya, beberapa guru atau banyak guru sejarah kurang dapat mengkomunikasikan pesan sejarah yang terkandung dalam materi pelajaran. Hal tersebut dikarenakan, guru secara sistematis telah “dibentuk” melalui

penataran-penataran yang lebih menekankan pada aspek politis dalam pembelajaran sejarah. Materi sejarah disampaikan untuk membenarkan pemerintah (penguasa) dalam kehidupan bernegara. Seperti disampaikan seorang guru kepada penulis, "Selama penataran di Malang, guru-guru sejarah lebih banyak membicarakan sejarah politik, sejarah untuk kepentingan politik". Bila demikian halnya, konsep pembelajaran sejarah dalam kerangka edukatif tidak akan terwujud. Karena pembelajaran sejarah secara kronologis deskriptif cenderung untuk membenarkan peristiwa yang pernah terjadi guna mendukung *status quo* dari segi politis. Oleh sebab itu, keberanian guru untuk menerjemahkan kurikulum dalam proses pembelajaran di depan kelas bagi upaya pembentukan sikap edukatif pada diri siswa perlu mendapat perhatian utama. Harus ada langkah konkrit dari praktisi pendidikan sejarah dan atau lembaga yang berwenang untuk re-evaluasi dan merekonstruksi terhadap konsep pembelajaran sejarah di sekolah.

Keberanian guru menerjemahkan kurikulum dimaksudkan agar dalam setiap proses pendidikan selalu terlingkupi oleh sistem nilai. Agar penghayatan dan pengamatan nilai-nilai dapat nampak, dianjurkan agar ada upaya-upaya *metodologik* yang dilakukan guru. Demikian pendapat Imam Barnadib dalam *Dinamika Pendidikan* (1997). Dalam menerjemahkan nilai-nilai inilah guru diharapkan dapat kreatif menyampaikan materi kepada anak didiknya secara *metodologis* di depan kelas. Kreativitas guru yang dimaksud ialah keterampilan dalam menggunakan metode mengajar sehingga proses penanaman nilai dapat diterima oleh siswa, tanpa mengurangi atau menyalahi konsep yang tertuang dalam kurikulum sebagai pedomannya.

Alternatif yang dianggap tepat dalam proses belajar mengajar sejarah yang menekankan pada pendidikan nilai ialah melalui pendekatan moral dalam metode pembelajarannya. Pendekatan moral merupakan proses penelaahan materi pelajaran yang dijelaskan melalui formulasi yang dapat membedakan benar dan salah, baik dan tidak, atau boleh dan tidak boleh dalam konsep yang dapat ditauladani dan tidak dapat ditauladani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan melalui pendekatan moral dalam metode pembelajaran sejarah, siswa dapat memiliki sikap yang luhur dalam kontribusinya menjunjung tinggi budaya bangsa.

Fungsi Sejarah dan Pendidikan Sejarah

Banyak peserta didik melihat sejarah sebagai pelajaran hafalan tentang peristiwa masa lampau, tidak ada hubungannya dengan kehidupan sekarang dan yang akan datang. Padahal, dalam menentukan *sikap hidup* sebagai suatu bagian dari kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, justru latar belakang sejarah disadari atau tidak disadari sangat mewarnai dalam menentukan pilihan sikapnya itu.

Sebagai suatu ilustrasi sederhana tentang kegunaan sejarah adalah *gelombang reformasi* yang menghantam pemerintahan Orde Baru dewasa ini. Dilihat dari sudut pandang *moral sejarah*, gelombang reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa dan didukung oleh rakyat tidak akan muncul apabila mahasiswa dan rakyat tidak mengetahui sejarah bangsa Indonesia lebih dahulu. Karena dalam perjalanan sejarahnya Orde Baru mulai banyak menyimpang dari cita-cita kemerdekaan, maka rakyat bersama mahasiswa meminta pertanggungjawaban pemerintah Orde Baru melalui reformasi. Peristiwa yang masih aktual ini terjadi, karena kesadaran sejarah bangsa, otomatis dapat menciptakan dan memperkuat identitas nasional di tengah-tengah berkembangnya budaya global dunia.

Suatu bangsa yang melupakan sejarahnya akan kehilangan identitasnya. Tidaklah berlebihan, apabila suatu bangsa atau negara rela mengucurkan anggaran yang cukup besar hanya untuk membuat simbol atau *ornamen* yang ditempatkan di tengah-tengah masyarakatnya sebagai perwujudan mencintai sejarah pendahulunya, sekaligus dapat menciptakan opini sebagai identitas bangsa.

Sejarah sebagai pendidikan moral yang diajarkan melalui PMP di sekolah atau melalui Penataran P4 pada masyarakat, menurut Kuntowijoyo (1997: 25) mempunyai maksud agar supaya Pancasila menjadi tolok ukur benar dan salah, baik dan buruk, berhak dan tidak dan lain-lain, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara *universal* dalam perspektif moral, belajar sejarah agar supaya menjadi orang yang bijaksana. Sedangkan dimensi praktis dari sejarah apabila orang mampu menangkap *sinyal kearifan* sejarah untuk memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial (A. Syafi'i Ma'arif, 1996: 42).

Dalam konteks pembentukan identitas bangsa (nasional) pengetahuan sejarah mempunyai fungsi fundamental. Di samping itu, kesadaran sejarah

merupakan sumber inspirasi serta aspirasi, keduanya sangat potensial untuk membangkitkan *sense of pride* (tanggung jawab dan kewajiban) sebagai bangsa. Dipandang dari wawasan itu, Sartono Kartodirdjo (1993: 247) menyatakan bahwa pengajaran sejarah berkedudukan sangat strategis dalam pendidikan nasional sebagai *soko guru* dalam pembangunan bangsa. Mengingat fungsi tersebut maka selayaknya pembelajaran sejarah menuntut perhatian yang khusus, tidak hanya substansialnya (konsep pembelajaran) tetapi termasuk cara menyampaikan dalam proses belajar mengajar yang efektif bagi pendidikan nasional.

Fungsi lain, pengajaran sejarah menurut Sartono Kartodirdjo (1993: 252) adalah fungsi genetis dan didaktis. Fungsi genetis hakekatnya ialah tentang pengetahuan sejarah, khususnya “bagaimana” peristiwa sejarah terjadi. Tentu saja penjelasannya mencakup “apa”, “siapa”, “di mana”, dan “kapan”nya. Adapun fungsi didaktis dimaksudkan agar (secara implisit atau eksplisit) generasi yang berikut dapat mengambil hikmat dan pelajaran dari pengalaman para pendahulunya. Lagi pula, agar suri tauladan mereka dapat menjadi model bagi keturunannya.

Uraian tentang sejarah sebagai pengendali moral mungkin lebih tepat, apabila mencermati ungkapan A. Syafi'i Ma'arif dengan penuh *emosional*. Dalam makalahnya yang berjudul *Agama, Sejarah dan Pembangunan Bangsa*, A. Syafi'i Ma'arif, (1997: Desember) berkata, sejarawan Indonesia (baca: sejarah) jangan hanya sibuk menghabiskan energi dalam menggali fakta demi fakta tanpa memerintahkan fakta itu untuk bersuara (*to speak out*) dan membongkar kenyataan pahit yang diderita rakyat kita dalam berbagai periode sejarah. Sebab dalam *rahim* sejarah terkandung informasi sangat kaya tentang perangai baik dan manusia jahat. Pernyataan itu, seolah-olah suatu “protes” terhadap kenyataan yang menunjukkan gejala disfungsi sejarah yang diperankan oleh sejarawan (guru sejarah) Indonesia saat ini.

Proses interaksi berkesinambungan antara sejarawan (sejarah), adalah *suatu dialog* tak pernah putus antara masa kini dan masa lampau. Dalam hal ini A. Syafi'i Ma'arif membenarkan pendapat Allen Nevins tentang fungsi sejarah. Adalah suatu kekeliruan bila penggunaan kata sejarah itu diberi makna sebagai berfikir tentang masa lampau. Sejarah sebenarnya sebuah *jembatan* yang menghubungkan masa lampau dengan masa kini, dan sekaligus menunjukkan arah ke masa depan.

Kesimpulan

Mengajarkan sejarah kepada para siswa bukan semata-mata mengkaji secara analitis tentang suatu peristiwa berdasarkan kronologi historis. Sejarah pada hakekatnya mengandung nilai moral kehidupan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi generasi suatu bangsa. Oleh sebab itu, penyampaian materi pelajaran sejarah di sekolah dalam konsep pendidikan lebih tepat menggunakan pendekatan moral. Melalui pendekatan moral diharapkan fungsi sejarah dalam konsep menanamkan nilai moral kepada para siswa dapat ditampilkan secara dinamis dalam dimensi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Keberanian guru menerjemahkan kurikulum dalam proses belajar mengajar menjadi kunci keberhasilan dalam penyampaian pelajaran.

Daftar Pustaka

- Ahmad Syafi'i Ma'arif (1996), *Ibn Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif (1997), Agama, Sejarah dan Pembangunan Bangsa, *Makalah Seminar*, hal. 1-11.
- Allen Rodney F. (1998; Juni), Social Science Teacher Education in An Era Globalization, *Makalah Seminar*, 1-14.
- Guru Bermutu Tak Selalu Patuh, *Kedaulatan Rakyat* (1997; 16 November).
- Imam Barnadib (1997), Pengembangan Kepribadian: Pengamatan dan Harapan, *Dinamika Pendidikan*, FIP IKIP Yogyakarta, No. 1/th. IV/1997, hal. 1-5.
- Kaswadi E.M.K. (1993), *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Kuntowijoyo (1997), *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Pelajaran Sejarah Alami Penyimpangan Tujuan, *Media Indonesia*, (1992; 12 Juli).
- Sartono Kartodirdjo (1993), *Pendidikan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.